



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Aktivitas Bisnis Korindo Group dalam Sektor Industri
Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Sosial-Ekonomi Masyarakat
Adat di Merauke

Skripsi

Oleh

Grasiana Novalia Siep

2016330149

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Aktivitas Bisnis Korindo Group dalam Sektor Industri
Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Sosial-Ekonomi Masyarakat
Adat di Merauke

Skripsi

Oleh

Grasiana Novalia Siep

2016330149

Pembimbing

Sapta Dwikardana, Ph.D.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Grasiona Novalia Siep
Nomor Pokok : 2016330149
Judul : Aktivitas Bisnis Korindo Group dalam Sektor Industri Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Sosial-Ekonomi Masyarakat Adat di Merauke

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 18 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

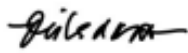
Ketua sidang merangkap anggota

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA.

: 

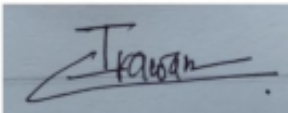
Sekretaris

Sapta Dwikardana, Ph.D.

: 

Anggota

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

: 

ta

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Grasiona Novalia Siep

NPM : 2016330149

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Aktivitas Bisnis Korindo Group dalam Sektor Industri Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Sosial-Ekonomi Masyarakat Adat di Merauke

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 29 Agustus 2023


GRASIANA NOVALIA SIEP

Abstrak

Nama : Grasiona Novalia Siep

NPM : 2016330149

Judul Skripsi : Aktivitas Bisnis Korindo Group dalam Sektor Industri Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Sosial-Ekonomi Masyarakat Adat di Merauke

Tingginya permintaan pasar terhadap minyak kelapa sawit telah menjadikan industri kelapa sawit di Indonesia sebagai salah satu industri unggulan yang sangat berkontribusi terhadap PDB negara, pengentasan kemiskinan, serta lapangan pekerjaan. Di Merauke, kemiskinan, deforestasi, konflik horizontal, dan pelanggaran HAM justru menjadi wajah dari industri kelapa sawit milik Korindo Group. Permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan, yaitu bagaimana aktivitas industri kelapa sawit Korindo Group berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat adat di Merauke? Dengan menggunakan teori Marxisme dan metode penelitian kualitatif deskriptif, penulis menganalisis kelas-kelas sosial dalam penelitian ini dan menemukan bahwa pembagian kelas yang terjadi akibat hadirnya Korindo Group di Merauke telah menciptakan kepemilikan pribadi atas lahan perkebunan kelapa sawit yang pada akhirnya menempatkan masyarakat ke dalam posisi subordinasi, yaitu sebagai kaum marginal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa walaupun industri kelapa sawit berkontribusi positif terhadap perekonomian negara, namun tidak memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat; dampaknya telah melahirkan penindasan terhadap masyarakat adat Malind di Kabupaten Merauke.

Kata Kunci: Industri kelapa sawit, Masyarakat Adat, Marxisme, Penindasan, Papua, Kapitalisme.

Abstract

Name : Grasiana Novalia Siep

Student Number : 2016330149

Title : Korindo Group's Business Activities in the Palm Oil Industry Sector and Socio-Economic Welfare of Indigenous Peoples in Merauke

The high market demand for palm oil has made the palm oil industry in Indonesia one of the leading industries that contributes greatly to the country's GDP, poverty alleviation, and employment. In Merauke, poverty, deforestation, horizontal conflict, and human rights violations are the faces of the Korindo Group's palm oil industry. This problem raises the question, namely how do Korindo Group's palm oil industry activities affect the socio-economic welfare of indigenous peoples in Merauke? By using the theory of Marxism and descriptive qualitative research methods, the authors analyze the social classes in this study and find that the class divisions that occurred as a result of Korindo Group's presence in Merauke have created private ownership of oil palm plantation land which ultimately places the community in a subordinated position, namely as the marginalized. These findings indicate that although the palm oil industry contributes positively to the country's economy, it does not have a positive influence on the socio-economic welfare of indigenous peoples; the impact has given birth to the oppression of the indigenous Malind community in Merauke Regency.

Keywords: Oil palm industry, Indigenous People, Marxism, Oppression, Papua, Capitalism.

KATA PENGANTAR

UCAPAN TERIMA KASIH

“Terpujilah TUHAN, karena Ia telah mendengar suara permohonanku.”
Mazmur 28:6

Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus; seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Hormat dan terima kasih tak terhingga kepada Bapa di Surga yang telah memberkati dan menyertai penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Bukan perjuangan yang mudah, namun oleh kasih karunia-Nya saja semua dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga untuk diri sendiri karena – seraya memilih untuk mendengarkan suara Tuhan – penulis dapat bertahan dan tetap berjuang hingga selesai. *Ana, tra gampang!*

Terima kasih sekali-lagi atas berkat-Mu yang tercurah bagi penulis melalui Mama dan Bapa yang selalu mendoakan; mendukung; dan bekerja keras untuk penulis, serta adik-adik penulis yang manis. Penulis juga mengucapkan syukur dan terima kasih tak terhingga kepada semua orang baik yang dengan sabar dan luar biasa membantu penulis. Tuhan memberkati senantiasa.

Penulis mengucapkan syukur dan terima kasih teramat dalam kepada Mas Sapta Dwikardana, Ph.D. atas kesabaran, bimbingan, dan ilmu yang penulis terima; Mas Marshall Adi Putra, S. IP., MA selaku dosen sekaligus kepala program studi Hubungan Internasional yang sangat membantu penulis dalam masa-masa akhir semester; pihak Fakultas yang juga sangat membantu memberikan keringanan bagi penulis sehingga tetap dapat menyelesaikan studi di HI Unpar. Tuhan memberkati senantiasa.

DAFTAR SINGKATAN

CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
DKI	Daerah Khusus Ibukota
FPIC	<i>Free, Prior, and Informed Consent</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HI	Hubungan Internasional
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
KTM	Kota Terpadu Mandiri
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MNC	<i>Multinational Corporation</i>
NASA	<i>National Aeronautics and Space Administration</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OAP	Orang Asli Papua
PADIATAPA	Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
PDB	Produk Domestik Bruto
PERDASUS	Peraturan Daerah Khusus
PMA	Perusahaan Modal Asing
PT	Perseroan Terbatas
PT BCA	PT Berkat Cipta Abadi
PT BMO	PT Bade Makmur Orisa
PT DP	PT Dongin Prabhawa
PT PAL	PT Papua Agro Lestari
PT TSE	PT Tunas Sawa Erma

POP	<i>Palm Oil Project</i>
SDA	Sumber Daya Alam
SKP KAMe	Sekretariat Keadilan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke
UU	Undang-Undang
UU OTSUS	Undang-Undang Otonomi Khusus

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Daftar Perusahaan Kayu Korindo Group di Papua.....	34-35
Tabel 2.2: Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Korindo Group di Papua.....	37
Tabel 3.1: Totem yang berkaitan dengan marga orang Malind.....	53-54
Tabel 3.2: Ciri-ciri Utama Rezim Tenaga Kerja Semiproletar.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Peta Investasi Korindo Group di Papua Selatan.....	35
Gambar 2.2: Titik Api di Area Konsesi PT Dongin Prabhawa.....	44
Gambar 2.3: Titik Api di Area Konsesi PT Dongin Prabhawa.....	44
Gambar 2.4: Wawancara BBC dengan perwakilan masyarakat.....	45

DAFTAR ISI

Abstrak.....	1
<i>Abstract</i>	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR SINGKATAN.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR ISI.....	8
BAB 1 PENDAHULUAN.....	9
1.1. Latar Belakang Masalah.....	9
1.2. Identifikasi Masalah.....	13
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	13
1.2.3. Perumusan Masalah.....	17
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	17
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	17
1.4. Kajian Pustaka.....	18
1.5. Kerangka Pemikiran.....	22
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
1.6.1. Metode Penelitian.....	27
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1.7. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB 2 INDUSTRI KELAPA SAWIT KORINDO GROUP DI MERAUKE.....	29
2.1. Latar Belakang dan Sejarah Masuknya Korindo Group di Papua.....	29
2.2. Analisis Kelas: Korindo Group sebagai Perusahaan Multinasional di Papua.....	32
2.3. Aktivitas Bisnis Korindo Group di Papua.....	36
BAB 3 AKTIVITAS INDUSTRI KELAPA SAWIT KORINDO GROUP TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT ADAT.....	47
3.1. Kabupaten Merauke.....	47
3.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Merauke.....	47
3.1.2. Pola Kehidupan Tradisional.....	50
3.2. Analisis Kelas: Masyarakat Adat sebagai Kelas Tereksplorasi.....	55
3.3. Analisis Kesejahteraan Sosial-Ekonomi Masyarakat Adat Malind.....	56
BAB 4 KESIMPULAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kapitalisme tersebar di seluruh dunia karena sifatnya yang berekspansi dan turut dilancarkan melalui globalisasi. Dalam era globalisasi ini, suatu negara semakin mudah menjalin relasi dengan negara lainnya, termasuk menjalankan hubungan kerja sama; salah satunya dalam bidang ekonomi.¹ Kerja sama ekonomi antar negara maupun non-negara yang dijalin telah mencerminkan adanya situasi ketergantungan atau interdependensi. Situasi tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi dimana suatu negara di saat yang bersamaan memiliki kelebihan komparatif dan kekurangan sehingga timbul ketertarikan dalam menjalin kerja sama guna memenuhi kebutuhan dalam negerinya;² biasanya berkaitan dengan kebutuhan terhadap sumber daya alam.³ Menurut Susan George, globalisasi sebenarnya tidak membuat kehidupan seluruh masyarakat di dunia ini akan beruntung. Kemudahan menjalin hubungan dengan setiap negara dilihat sebagai model globalisasi neoliberal yang hanya mengalihkan kekayaan dari kelompok miskin kepada kelompok kaya dan menyuburkan ketidaksetaraan di dalam dan antar bangsa.⁴ Hal tersebut berbicara mengenai akumulasi modal yang menjadi karakteristik sistem ekonomi kapitalisme.

Akumulasi modal atau kapital merupakan tujuan utama kapitalisme yang berusaha dicapai melalui investasi ekonomi atau penanaman modal.⁵ Investasi ekonomi baik yang

¹ Vanya Karunia Mulia Putri, "Mengapa Kerja Sama Antarnegara Diperlukan pada Era Globalisasi?", accessed on 6/22/2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/29/163000869/mengapa-kerja-sama-antarnegara-diperlukan-pada-era-globalisasi->.

² Dr. Umar Suryadi Bakri, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (Jakarta: Kencana, 2017), 77.

³ Vanya Karunia Mulia Putri, "Mengapa Kerja Sama Antarnegara Diperlukan pada Era Globalisasi?", accessed on 6/22/2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/29/163000869/mengapa-kerja-sama-antarnegara-diperlukan-pada-era-globalisasi->.

⁴ Susan George, *Republik Pasar Bebas* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2002), 62-63.

⁵ Arrial Thoriq Setyo Rifano, "Resensi Buku: Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan", accessed on 6/22/2023, <https://manifestpers.id/?p=2596>.

dilakukan oleh investor lokal maupun investor asing dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kerja sama yang berkontribusi bagi peningkatan pendapatan negara. Ketika perusahaan memperoleh peralatan produksi baru untuk meningkatkan total output barang dalam fasilitas, peningkatan produksi dapat menyebabkan produk domestik bruto (PDB) negara itu naik. Hal ini memungkinkan ekonomi tumbuh melalui peningkatan produksi berdasarkan pada investasi peralatan sebelumnya.⁶

Mengacu pada kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pertanian merupakan salah satu sektor yang memainkan peran penting dalam sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021, sektor tersebut menyumbang PDB negara sebesar 13,28 persen. Di dalam sektor pertanian, terdapat beberapa subsektor; salah satunya adalah subsektor perkebunan.⁷ Di zaman kapitalisme industri, salah satu investasi yang berdampak positif bagi perekonomian negara adalah industri kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang mendominasi produksi minyak kelapa sawit di dunia. Di Indonesia, kelapa sawit merupakan satu dari sekian komoditas perkebunan yang penting dan strategis karena berkontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan nasional serta meningkatkan devisa negara.⁸ Hal tersebut mencerminkan peluang keuntungan yang positif dan besar bagi negara produsen yaitu Indonesia terutama karena hasil industri seperti sabun, lilin, minyak goreng, perawatan tubuh, dll masih menjadi kebutuhan setiap manusia di dunia. Pada 2013, industri kelapa sawit di Indonesia telah menyumbang 1.6 *Gross Domestic Product* (GDP) nasional dan berkontribusi sebesar 20 miliar atau 11% dari total ekspor

⁶ Adam Hayes, "Investment Basics Explained With Types to Invest In", accessed on 3/3/2020, <https://www.investopedia.com/terms/i/investment.asp>

⁷ Badan Pusat Statistik, "Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021", accessed on 7/2/2023, <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/254ee6bd32104c00437a4a61/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2021.html>

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan", accessed on 6/22/2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan#>

kepada lebih dari 45 negara.⁹ Minyak dari kelapa sawit memang merupakan bahan dasar dari berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, pembersih rumah tangga, hingga kosmetik. Namun di saat yang bersamaan, pengembangan komoditas kelapa sawit ini telah menghancurkan hutan, mencemari udara dan saluran air, memusnahkan spesies-spesies yang masuk ke dalam kategori terancam punah, merampas hak-hak masyarakat adat, dan mendorong perubahan iklim, serta menyengsarakan masyarakat miskin di pedesaan.¹⁰

Lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tersebar di 25 provinsi, yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Papua.¹¹ Di Papua, aktivitas industri kelapa sawit beroperasi hampir di setiap daerah/kabupaten yang ada, yaitu Jayapura, Keerom, Merauke, Boven Digul, Sarmi, Nabire, Timika, Sorong, Waropen, Asmat, Yahukimo, dan Mappi.¹² Menurut data Badan Pusat Statistik, luas area perkebunan dari perusahaan swasta di Indonesia pada 2018 berupa 6,356 182 ha.¹³ Angka tersebut lebih besar dari area perkebunan kelapa sawit milik perusahaan negara dan perkebunan rakyat. Hal ini berarti bahwa industri kelapa sawit di Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Dalam meningkatkan investasi industri kelapa sawit, Indonesia telah menggandeng investor-investor asing untuk bekerjasama pada sektor tersebut. Salah satunya di Kabupaten Merauke; terdapat perusahaan asing besar dari Korea Selatan bernama Korindo Group yang sudah beroperasi di sana melalui anak-anak perusahaannya. Di kabupaten tersebut, terdapat

⁹ Asian Agri, “Bermanfaat Bagi Negara” accessed on 3/4/2020, <https://www.asianagri.com/id/penciptaan-nilai-bersama/negeri>.

¹⁰ morethanhumanworlds, “Sophie Chao”, accessed on 4/27/2023, <https://www.morethanhumanworlds.com/>.

¹¹ Badan Pusat Statistik, “Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018”, accessed on 6/22/2023, <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/22/1bc09b8c5de4dc77387c2a4b/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2018.html>.

¹² Pusaka, *Atlas Sawit Papua*, report, Pusaka, (Jakarta: Pusaka, 2015), <https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/09/Atlas-Sawit-Papua.pdf>.

¹³ Badan Pusat Statistik, “Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018”, accessed on 6/22/2023, <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/22/1bc09b8c5de4dc77387c2a4b/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2018.html>.

tiga anak usaha Korindo yang sudah beroperasi, yakni PT Berkat Cipta Abadi, PT Dongin Prabhawa, dan PT Papua Agro Lestari.¹⁴ Pada tahun 2013, Korindo mulai menebangi hutan-hutan berharga di Kabupaten Merauke, sebagian melalui penggunaan api secara ilegal. Perkebunannya meliputi total 149.000 ha dan telah aktif di sektor kehutanan di Papua sejak 1993. Korindo mendirikan perkebunan kelapa sawit pertamanya di Papua pada 1998.¹⁵

Survei yang telah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Pusaka, dan lembaga lain terkait seperti SKP KAMe (Sekretariat Keadilan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke) mendapati bahwa kehadiran bisnis industri kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telah melahirkan dampak negatif yang berpotensi memicu konflik. Dampak negatif tersebut terbagi ke dalam beberapa aspek seperti aspek sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan aspek lainnya. Dari aktivitas investasi industri kelapa sawit ini sendiri, baik di Merauke maupun secara umum di Indonesia, semua LSM mendapati bahwa masyarakat adatlah yang justru menjadi korban. Kesejahteraan mereka khususnya sosial-ekonomi ternyata tidak seindah janji-janji perusahaan sebelum beroperasi. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pelanggaran hak-hak adat masyarakat, meningkatnya militerisasi, kekerasan, dan penambahan anggota aparat keamanan (polisi), bahkan nilai-nilai adat dan budaya setempat menjadi terancam.¹⁶

Dengan penjabaran singkat di atas, penulis mengajukan judul penelitian berupa **“Aktivitas Bisnis Korindo Group dalam Sektor Industri Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Sosial-Ekonomi Masyarakat Adat di Merauke”**.

¹⁴ Pusaka, *Atlas Sawit Papua*, report, Pusaka, (Jakarta: Pusaka, 2015), <https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/09/Atlas-Sawit-Papua.pdf>.

¹⁵ Environmental Justice Atlas, “Korindo clearing forests for oil palm plantations, Papua, Indonesia”, accessed on 3/5/2020, <https://ejatlas.org/conflict/korindo-clearing-forests-for-oil-palm-plantations-Papua-indonesia>.

¹⁶ Ibid.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Papua merupakan rumah bagi 274 suku asli yang telah mendiami pulau *New Guinea* selama puluhan hingga ribuan tahun lalu. Masyarakat asli Papua telah hidup di sana jauh sebelum Indonesia bahkan penjelajah Eropa menemukan pulau tersebut.¹⁷ Sebagai negara yang kaya akan SDAnya, Indonesia aktif berinvestasi dalam berbagai industri ekstraktif. Industri kelapa sawit sendiri telah menggunakan sebagian besar hutan di bagian barat Indonesia, dengan pusat utamanya di Kalimantan dan Sumatera.¹⁸ Di bagian Timur negara ini, yaitu di Provinsi Papua, sudah terdapat sekitar 21 perusahaan yang beroperasi pada tahun 2014 dan hampir sebagian besar perusahaan tersebut dipayungi oleh perusahaan modal asing (PMA) dari berbagai negara di Asia.¹⁹

Merauke, sebuah kabupaten di Selatan Papua, sebelumnya tidak pernah menjadi daerah sasaran perkembangan industri penebangan kayu. Namun, daerah ini sudah menjadi tempat aktivitas industri perkebunan yang berjalan lancar. Hal tersebut tidak terlepas dari hadirnya mega proyek *food estate*, yakni MIFEE. MIFEE sendiri merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan pusat yang diresmikan pada Agustus 2010. Program tersebut sebenarnya merupakan pengembangan dari program yang sudah ada sebelumnya, yaitu *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE) yang dicetus oleh John Gluba Gebze selaku Bupati Merauke di masa itu. Kemudian, melalui INPRES No. 5 Tahun 2008 yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertanian diminta mengeluarkan kebijakan

¹⁷ International Coalition for Papua, *Human Rights in West Papua 2017*, report, <https://franciscansinternational.org/wp-content/uploads/2022/11/HumanRightsPapua2017-ICP.pdf>.

¹⁸ Pusaka, Atlas Sawit Papua, report, Pusaka, (Jakarta: Pusaka, 2015), <https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/09/Atlas-Sawit-Papua.pdf>.

¹⁹ Ibid.

pengembangan *food estate* di Merauke.²⁰ Pada dasarnya, mega proyek tersebut merupakan hasil pertemuan dua jenis kepentingan. Di satu sisi, MIFEE adalah upaya pemerintah pusat guna mengatasi permasalahan krisis pangan dan energi, serta sebagai upaya penghematan dan penghasilan devisa. Di sisi lain, MIFEE merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat atau upaya peningkatan pembangunan.²¹ MIFEE turut mendukung dan memayungi program pengembangan pangan skala besar yang sudah ada seperti jagung, singkong, dan beras. Namun, rencana pengembangan pangan tersebut pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. MIFEE justru memberikan manfaat besar kepada para borjuis sawit untuk pengembangan industri kelapa sawit yang pada akhirnya mendominasi proyek investasi di Merauke.²² Keterlibatan berbagai perusahaan swasta dari dalam negeri dan luar negeri sangat mendominasi proyek MIFEE. Keterlibatan tersebut turut didukung negara dengan mengeluarkan berbagai peraturan lain yang mendukung keterlibatan swasta dan MIFEE diantaranya: PP No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, yang menjustifikasi perusahaan swasta untuk menguasai lahan di wilayah Papua dapat diberikan dua kali lebih luas atau sama dengan 20.000 hektar (Pasal 18); Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang menetapkan Merauke sebagai kawasan andalan untuk pertanian dan perkebunan; UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; PP No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara

²⁰ Y. L. Franky, “Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM”, accessed on 5/29/2023, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Mega-Proyek-MIFEE-Suku-malin-Animdan-Pelanggaran-HAM.pdf>.

²¹ R. Yando Zakaria, Emilianus Ola Kleden, Y.L. Franky, *MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind*, report, Forest Peoples Programme, (Jakarta: R. Yando Zakaria, Emilianus Ola Kleden, Y.L. Franky, 2011), accessed on 5/29/2023, <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/06/mifee-buku-low-res.pdf>.

²² Pusaka, *Atlas Sawit Papua*, report, Pusaka, (Jakarta: Pusaka, 2015), <https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/09/Atlas-Sawit-Papua.pdf>.

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; PP No. 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendaaygunaan Tanah Terlantar; dan berbagai peraturan lainnya.²³

Orang Malind ternyata tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas tentang MIFEE. Mereka tidak mengerti manfaat dan resiko apa saja yang akan diterima dari hadirnya *food estate* atau lumbung pangan tersebut. Mereka juga tidak mengerti mengenai jaminan terhadap perlindungan atas hak-hak mereka di masa depan.²⁴ Mereka ditawarkan kompensasi yang sangat sedikit dalam rangka mengganti hutan yang dicuri pemerintah dan perusahaan. Hutan yang sama adalah hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat dan leluhur mereka selama berabad-abad²⁵ bahkan jauh sebelum negara dan para kapitalis hadir.

Sebuah perusahaan modal asing yang memayungi bisnis kelapa sawit di Merauke berasal dari Korea Selatan, yaitu Korindo Group. Perusahaan besar tersebut memiliki anak perusahaan yaitu PT. Berkat Cipta Abadi (PT BCA) dan PT. Papua Agro Lestari (PT PAL) di Distrik Ulilin dan PT Dongin Prabhawa (PT DP) yang berlokasi di sekitar Sungai Digoel di Mam.²⁶ Nama-nama perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah pencitraan agar memberi kesan pro-rakyat dan lingkungan meskipun faktanya kontras.²⁷ Banyak perusahaan baru yang muncul untuk beroperasi di Merauke dan merugikan masyarakat adat di sana baik merusak hutan maupun memberi bayaran yang tidak sesuai dengan lahan yang diambil. Semua itu dilakukan demi kepentingan investasi tanpa memperhatikan dampak buruk yang dirasakan masyarakat.

²³ Y. L. Franky, "Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM", accessed on 5/29/2023, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Mega-Proyek-MIFEE-Suku-malin-Animdan-Pelanggaran-HAM.pdf>.

²⁴ R. Yando Zakaria, Emilianus Ola Kleden, Y.L. Franky, *MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind*, report, Forest Peoples Programme, (Jakarta: R. Yando Zakaria, Emilianus Ola Kleden, Y.L. Franky, 2011), accessed on 5/29/2023, <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/06/mifee-buku-low-res.pdf>.

²⁵ AwasmifEE, "Tentang kami", accessed on 5/29/2023, https://awasmifEE.potager.org/?page_id=37&lang=id.

²⁶ Ibid, 50.

²⁷ Ibid, 3.

Orang Malind sebagai masyarakat adat dari suku asli di Kabupaten Merauke memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Identitas marga mereka sangat berkaitan dengan tumbuhan dan satwa tertentu. Hampir tidak ada dari mereka yang menganggap bahwa perkebunan dapat memberi kesejahteraan bagi kehidupan mereka.²⁸ Banyak dampak buruk yang terjadi pada masyarakat adat di sana, terutama dampak terhadap hak asasi masyarakat seperti konflik berdarah antar sesama warga desa, pencemaran sungai, meningkatnya kematian balita, dan tersingkirnya hutan sagu, dll. Masyarakat adat telah melakukan perlawanan pada perusahaan namun dalam beberapa kasus, perusahaan pada akhirnya berhasil meyakinkan para pemimpin marga sebagai pemegang hak ulayat untuk memberikan tanahnya ke perusahaan – dengan bayaran yang tidak setimpal jika dibandingkan dengan luas tanah yang diberikan.²⁹

Pada akhirnya, industri-industri ekstraksi di Papua terutama perkebunan kelapa sawit merupakan ancaman bagi tanah, manusia, ekosistem Papua,³⁰ dan bagi sebagian masyarakat adatnya – seperti di area konsesi Korindo – industri tersebut telah melemahkan eksistensi masyarakat adat dalam kerangka cara hidup subsisten. Berbagai hal tersebut memicu aspirasi politik dari masyarakat dan sikap politik masing-masing individu dalam menuntut penentuan nasib sendiri; salah satunya disebabkan juga oleh penyempitan ruang aman bagi masyarakat adat untuk mendapatkan FPIC atau *Free, Prior, and Informed Consent* atau PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) ketika sumber daya para leluhur mereka hendak dieksploitasi.³¹

²⁸ Sapariah Saturi, “6 Perusahaan Sawit Cemari Sungai di Merauke”, <https://www.mongabay.co.id/2012/12/25/6-perusahaan-sawit-cemari-sungai-di-merauke/>, diakses pada 15/02/2020.

²⁹ Pusaka, Atlas Sawit Papua, report, Pusaka, (Jakarta: Pusaka, 2015), <https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/09/Atlas-Sawit-Papua.pdf>.

³⁰ International Coalition for Papua, *Human Rights in West Papua 2017*, report, <https://franciscansinternational.org/wp-content/uploads/2022/11/HumanRightsPapua2017-ICP.pdf>.

³¹ Ibid.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji industri kelapa sawit milik Korindo Group yang dioperasikan oleh anak-anak perusahaannya di Merauke dalam kurun waktu 2011 - 2016. Dalam penelitian ini, wilayah Merauke merujuk pada Kabupaten Merauke dimana terdapat tiga anak usaha Korindo yang beroperasi dalam sektor industri kelapa sawit, yaitu PT Dongin Prabhawa (PT DP); PT Berkat Cipta Abadi (PT BCA); dan PT Papua Agro Lestari (PT PAL).

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian berupa: **“Bagaimana aktivitas industri kelapa sawit Korindo Group berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat adat di Merauke?”**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari aktivitas bisnis industri kelapa sawit Korindo Group terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat adat di Merauke.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ditulis secara objektif sehingga kegunaannya diharapkan mampu memberikan pembaca sudut pandang baru dalam melihat persoalan penindasan secara

keseluruhan yang terjadi di Papua dengan lebih bijak, kritis, dan tentunya objektif. Gambaran penindasan terhadap masyarakat adat sekaligus OAP yang dipaparkan dalam konteks industri kelapa sawit Korindo Group di Merauke ini perlu dilihat sebagai sebuah bentuk pelestarian penindasan di Papua sejak tahun 1960-an.

1.4. Kajian Pustaka

Guna memperdalam penelitian, penulis mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul *Oil Palm Plantations, Forest Conservation and Indigenous Peoples in West Papua Province: What Lies Ahead?* yang ditulis oleh Yubelince Y. Runtuboi, dkk³² dikatakan bahwa perkebunan kelapa sawit benar-benar mengalami ekspansi sampai ke daerah Indonesia Timur khususnya di Provinsi Papua Barat. Fokus dari pembahasan dalam jurnal ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua Barat, dan dampak-dampaknya terhadap hutan dan masyarakat asli di sana. Jurnal ini juga ingin melihat apakah industri perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus dan tujuan Peraturan Pembangunan Berkelanjutan di provinsi tersebut.³³ Pengembangan kelapa sawit dengan dalih pengentasan kemiskinan cenderung membahayakan peran, kewenangan, dan keberadaan masyarakat asli Papua secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan perampasan tanah adat, pelanggaran hak ulayat dan beban ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang dihadapi masyarakat adat sebagai akibat dari hilangnya sumber daya hutan dan lahan.³⁴

Peraturan otonomi khusus menekankan pentingnya mengakui kondisi sosial budaya masyarakat adat. Tujuan pembangunan adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan

³² Yubelince Y. Runtuboi, Dwiiko B. Permadi, Muhammad Alif K. Sahide, and Ahmad Maryudi, "Oil Palm Plantations, Forest Conservation and Indigenous Peoples in West Papua Province: What Lies Ahead?", *Forest and Society* Vol. 5 (1), April 2021:page 23, doi.org/10.24259/fs.v5i1.11343

³³ Ibid, 23

³⁴ Ibid, 27

di Provinsi Papua Barat. Namun, apa yang terlihat dari praktik perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat, memunculkan beberapa isu yang dianggap tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Ekspansi kelapa sawit di provinsi Papua Barat semakin dianggap merusak tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Pesatnya pertumbuhan kelapa sawit di Papua Barat tidak dibarengi dengan tata kelola yang baik, pengakuan, dan peningkatan kapasitas orang asli Papua.³⁵

Literatur kedua yang digunakan untuk penelitian penulis yaitu makalah dari Agus Andrianto, Barnabas F. Sedik, dkk yang berjudul *The Impacts of Oil Palm Plantations On Forests and People In Papua: A Case Study From Boven Digoel District*. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang pesat karena adanya peningkatan permintaan global untuk minyak nabati. Walaupun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara, perluasan perkebunan kelapa sawit ini merupakan penyebab dari masalah lingkungan.³⁶

Makalah ini fokus menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel. Makalah ini juga menyoroti regulasi-regulasi yang berlaku di Papua terkait investasi perkebunan kelapa sawit.

UU Otonomi Khusus Papua, yang dikeluarkan pada tahun 2001, mengatur lebih lanjut bagaimana investor beroperasi di provinsi ini. UU tersebut menyoroti perlunya investor untuk menciptakan peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam operasi perkebunan dan untuk mengakui dan menghormati hak-hak tanah adat. Investor kelapa sawit selanjutnya diminta untuk menawarkan pekerjaan kepada masyarakat lokal. UU Otsus juga menetapkan

³⁵ Ibid, 27

³⁶ Agus Andrianto, Barnabas F. Sedik, Habel Waridjo, Heru Komarudin, Krystof Obidzinski, "The Impacts of Oil Palm Plantations On Forests and People In Papua : A Case Study From Boven Digoel District", Center for International Forestry Research (CIFOR) Working Paper 278 (2014): 1

bahwa kegiatan pembangunan harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi, melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi yang penting.³⁷

Selain diatur dalam UU Otsus, PERDASUS No. 23/2008 juga mengatur tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.³⁸ Regulasi tersebut mensyaratkan adanya persetujuan lokal untuk proyek pembangunan skala besar dan investasi perkebunan. Keberadaan masyarakat adat pun diakui selama mereka berfungsi sebagai unit sosial dimana struktur sosial tradisional dipertahankan dan hukum adat berlaku.³⁹

Di Boven Digoel, investasi perkebunan kelapa sawit dijalankan oleh anak perusahaan dari Korindo Group, yaitu PT. Tunas Sawa Erma sejak 1998.⁴⁰ Menurut makalah ini, investasi tersebut telah berkontribusi pada pendapatan daerah dan negara, menciptakan lapangan kerja, membangkitkan ekonomi lokal, dan meningkatkan infrastruktur. Namun, berbagai dampak yang merugikan juga dirasakan oleh masyarakat seperti deforestasi. Makalah ini menegaskan praktik umum pembukaan hutan saat mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Selama tahun 2000–2008, perusahaan menyebabkan hilangnya 19.680 ha hutan atau 47% dari total deforestasi di Kabupaten Boven Digoel. Selain itu, berbagai dampak negatif juga terjadi pada lingkungan beberapa diantaranya yaitu, kualitas air menurun, erosi tanah dan pencemaran udara, serta hilangnya tutupan hutan.⁴¹

Jurnal ketiga berjudul *Understanding The Expansion of Oil Palm Cultivation: A Case-Study In Papua* oleh Pablo Acosta dan Maria Dolores Curt. Tujuan keseluruhan dari

³⁷ Ibid, 6.

³⁸ JDIH BPK RI, “Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 23 Tahun 2008”, accessed on 12/2/2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89759/perdasus-papua-no-23-tahun-2008#:~:text=PERDASUS%20PAPUA%20No.%202023%20Tahun,Atas%20Tanah%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

³⁹ Agus Andrianto, Barnabas F. Sedik, Habel Waridjo, Heru Komarudin, Krystof Obidzinski, “The Impacts of Oil Palm Plantations On Forests and People In Papua : A Case Study From Boven Digoel District”, Center for International Forestry Research (CIFOR) Working Paper 278 (2014): 6

⁴⁰ Ibid, 3

⁴¹ Ibid, 21

jurnal ini adalah memahami alasan mendasar dari perluasan atau ekspansi perkebunan kelapa sawit di lahan berhutan. Perluasan perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi positif di bidang ekonomi terutama terhadap lapangan kerja di pedesaan. Perkebunan kelapa sawit dapat mewakili 63% pendapatan rumah tangga petani kecil, dan 22.000 hingga 120.000 kesempatan kerja telah diciptakan di Provinsi Kalimantan Timur. Investasi kelapa sawit juga berkontribusi terhadap meningkatnya PDB, menciptakan kemakmuran, dan pembangunan infrastruktur,⁴² serta memberikan peluang kewirausahaan, juga penciptaan industri hulu dan hilir.⁴³ Meskipun demikian, perkebunan yang didirikan di lahan berhutan memiliki konsekuensi negatif karena menghilangkan jasa ekosistem baik di tingkat lokal maupun global. Bagi masyarakat, hutan merupakan sumber pendapatan, kebebasan, dan inspirasi. Perkebunan dapat membawa manfaat ekonomi, namun hilangnya hutan tentu tidak dapat diganti.⁴⁴

Jurnal keempat berjudul *Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and Their Implications for Biofuel Production in Indonesia* ditulis oleh Krystof Obidzinski, Rubeta Andriani, Heru Komarudin, dan Agus Andrianto. Jurnal ini mengulas pengembangan kelapa sawit dan keterkaitannya dengan biofuel di Indonesia serta menganalisis dampak lingkungan dan sosial-ekonominya.⁴⁵ Untuk keperluan penelitian, para penulis memilih tiga lokasi di Indonesia yaitu Manokwari (Papua Barat), Boven Digoel (Papua), dan Kubu Raya (Kalimantan). Dari ketiga lokasi tersebut, ditemukan persamaan dampak pada lingkungan dari aktivitas pengembangan kelapa sawit diantaranya deforestasi yang mengakibatkan munculnya dampak eksternal berupa polusi udara dan air, serta longsor. Dampak dari segi

⁴² Pablo Dacosta and Maria Dolores Curt, "Understanding The Expansion of Oil Palm Cultivation: A Case-Study in Papua", *Journal of Cleaner Production* 219 (February 2019) 199-216: 200

⁴³ *Ibid*, 215

⁴⁴ *Ibid*, 215

⁴⁵ Krystof Obidzinski, Rubeta Andriani, Heru Komarudin, Agus Andrianto, "Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and Their Implications for Biofuel Production in Indonesia", *Article in Ecology and Society* 17(1): 25 (Maret 2012)

sosial, para pemangku kepentingan seperti karyawan, dll mendapatkan peningkatan keuntungan yang baik, namun manfaat tersebut menurut para penulis tidak terdistribusi secara merata. Pemangku kepentingan lainnya seperti pemilik tanah mengalami pembatasan hak penggunaan tanah tradisional dan kehilangan tanah. Selain itu, investasi kelapa sawit pun menyebabkan terjadinya peningkatan atas kelangkaan tanah, kenaikan harga tanah, dan konflik atas tanah di semua lokasi.⁴⁶

Dari keempat literatur tersebut, dampak industri kelapa sawit yang dijabarkan merupakan dampak-dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat berdasarkan hasil penelitian, baik dari segi sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Terdapat kesamaan atas berbagai dampak yang diterima masyarakat baik di beberapa daerah di Papua maupun di Kalimantan dan pada akhirnya mempengaruhi hutan dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar lokasi perkebunan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Marx menjelaskan bahwa untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan, pakaian, dan rumah, serta berbagai barang lainnya. Kebutuhan tersebut dapat dimiliki melalui sebuah cara yang disebut ‘berproduksi’ yang kemudian berarti manusia harus bekerja. Produksi ekonomi merupakan dasar dari seluruh aktivitas manusia termasuk berpolitik. Basis ekonomi sendiri terdiri dari dua aspek: kekuatan produksi (misalnya mesin industri versus kerajinan tangan) dan hubungan produksi, yaitu sistem kepemilikan sosial yang menentukan kendali aktual atas kekuatan-kekuatan produktif (misalnya, kepemilikan kolektif versus kepemilikan pribadi). Kedua aspek tersebut secara bersamaan membentuk ‘cara produksi’ tertentu. Di masa kapitalisme, kekuatan produksinya ada pada mesin-mesin industri dan hubungan produksinya adalah kepemilikan pribadi (Jackson & Sorensen, 2013: 168).

⁴⁶ Ibid

Kepemilikan pribadi adalah yang menciptakan terjadinya pembagian kelas sosial yang antagonis: borjuis dan proletar, sehingga menyebabkan kontradiksi kelas berikut pertentangan kelas yang tidak terdamaikan. Karl Marx memandang ekonomi sebagai wadah eksploitasi manusia dan kesenjangan kelas. Marx sepakat dengan gagasan *zero-sum* dan menerapkannya ke dalam relasi kelas sosial. (Jackson & Sorensen, 2013: 167). Salah satu aktor yang berpengaruh dan atau berperan penting dalam sistem kapitalisme adalah perusahaan multinasional. Secara sederhana, Robert Gilpin mendefinisikan perusahaan multinasional atau *multinational corporation* (MNC) sebagai perusahaan yang memiliki dan sekaligus mengelola unit ekonominya di lebih dari satu negara. Hal tersebut berkaitan dengan penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) oleh perusahaan dan kepemilikan unit ekonomi seperti industri ekstraktif, pabrik manufaktur, atau jasa di beberapa negara.⁴⁷

Kelas sosial sendiri menurut Lenin diartikan sebagai golongan sosial yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Bagi Marx, sebuah kelas akan layak disebut sebagai kelas ketika suatu kelompok tidak hanya secara objektif termasuk dalam kategori kelas tertentu berdasarkan kepentingannya, namun secara subjektif juga menyadari dirinya sebagai kelas tertentu yang memiliki berbagai kepentingan spesifik serta mau memperjuangkannya (Franz Magnis-Suseno, 1999: 116-117). Kelas borjuis adalah para pemilik alat produksi – mesin, pabrik, tanah dan mineral, hutan, alat-alat kerja – dan kelas proletar adalah para pemilik tenaga yang kemudian dijual ke kaum borjuis. Buruh yang merupakan kelas proletar harus bekerja lebih banyak untuk mendapatkan gaji yang kecil. Marx memandang dalam situasi tersebut, ada nilai lebih (*surplus value*) yang dicuri oleh kelas borjuis. Itulah yang disebut keuntungan bagi para kapitalis; yang berasal dari eksploitasi kelas proletar. (Jackson & Sorensen, 2013: 167).

⁴⁷ Gilpin, Robert, and Jean M. Gilpin. *The Political Economy of International Relations*. Princeton University Press, 1987. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt19wct3>.

Guna mengidentifikasi (baca: analisis) kelas sosial, Henry Bernstein dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria: *Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria*” menulis empat pertanyaan kunci dari perspektif ekonomi politik sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi sebuah kelompok atau komunitas ke dalam kelas sosial tertentu (Bernstein, 2019: 30-32):

1. *Siapa memiliki apa?* merupakan pertanyaan pertama yang merujuk pada hubungan sosial dalam bermacam rupa rezim “properti”: bagaimana faktor atau alat produksi dan reproduksi didistribusikan. Dalam konteks kapitalisme ditemukan konsep dan praktik *kepemilikan pribadi* serta *barang milik pribadi* yang sekaligus turut membantu menjelaskan mengenai kapitalisme itu sendiri.
2. *Siapa melakukan apa?* merupakan pertanyaan selanjutnya yang membahas pembagian kerja secara sosial. Kelompok atau aktor yang melakukan aktivitas produksi dan reproduksi sosial telah tersusun oleh bermacam-macam hubungan sosial.
3. *Siapa mendapat apa?* berbicara tentang pendistribusian “hasil kerja” atau pembagian pendapatan secara sosial. Biasanya disebut sebagai distribusi “pendapatan”. Dalam masyarakat kapitalisme, hasil kerja mengacu pada pendapatan uang bagi korporasi atau individu. Berbeda dengannya, dalam masyarakat prakapitalisme terdapat hasil kerja yang berwujud bukan uang. Contohnya berupa pangan hasil produksi petani kecil untuk keperluan konsumsi mereka. Contoh lainnya seperti hasil dari kerja-kerja domestik dan pekerjaan non-upahan lainnya.
4. *Digunakan untuk apa hasil yang didapat itu?* adalah perihal relasi sosial dalam konsumsi, akumulasi, dan reproduksi. Bernstein menguraikan ketiga hal tersebut sebagai biaya konsumsi, biaya penggantian, dan biaya aktivitas seremonial, serta biaya rentan. Tiga jenis biaya pertama ditemukan dalam seluruh masyarakat agraris sejak awal. Lalu, biaya rentan hadir seiring terciptanya pembagian kelas dalam

masyarakat agraris. Pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan bagaimana tiap hubungan sosial yang berbeda dalam produksi dan reproduksinya menentukan penggunaan dan pendistribusian produk sosialnya.

Dalam melihat situasi atau kondisi masyarakat adat setelah masuknya kapitalisme, Bernstein menggunakan istilah “rezim tenaga kerja” untuk menampilkan berbagai cara untuk memobilisasi tenaga kerja – dan kaitan cara-cara tersebut – dengan bagaimana para pekerja tadi diorganisasikan dalam proses produksi, serta bagaimana para pekerja menjaga cara subsistensi mereka. Rezim kerja itu sendiri terdiri dari empat jenis, yakni: kerja paksa, semiproletarianisasi, produksi komoditas skala kecil, serta proletarianisasi. Dalam melihat konteks masyarakat adat di Kabupaten Merauke, penulis akan menggunakan salah satu jenis rezim tenaga kerja, yaitu semiproletarianisasi.

Pemisahan produsen dari alat produksi kolektifnya menjadi kepemilikan pribadi (oleh kelas borjuis) dalam sistem kapitalisme ini telah menutup kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk mengalami kondisi setara serta adil. Kaum Marxis menganggap bahwa segala bentuk penindasan berasal dari struktur ekonomi kapitalis.⁴⁸ Marx menggambarkan penindasan ke dalam dua bentuk, yaitu penindasan kelas dan penindasan khusus. Penindasan kelas sendiri berarti pengalaman hidup subordinasi yang ada pada kaum tereksplorasi atau kaum yang menderita diskriminasi sosial, ekonomi, dan politik. Penindasan khusus secara spesifik membagi kelas pekerja atau kelas tertindas mana pun di antara sesama mereka. Pembagian tersebut mengaburkan perbedaan kelas dengan menghasilkan demakarsi baru yang dimanfaatkan sebagai sarana subordinasi. Kapitalisme sangat membutuhkan penindasan khusus untuk mengancam persatuan seluruh kelas tertindas dalam melawan kelas penindas. Penindasan jenis ini memaksa rasa persaingan antar sesama kelas tertindas yang oleh karena

⁴⁸ Arah Juang, “Mengapa Kapitalisme Melahirkan Penindasan”, accessed on 6/26/2023, <https://www.arahjuang.com/2021/05/10/mengapa-kapitalisme-melahirkan-penindasan/>.

itu melemahkan kapasitas kolektif guna melakukan perlawanan.⁴⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep penindasan kelas.

Penindasan tersebut tentu dapat dibuktikan dengan pandangan (baca: konsep) kesejahteraan. Menurut James Midgley, individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat sama-sama mengalami permasalahan sosial namun perbedaannya terletak pada sejauh mana mereka mengelola masalah-masalah sosial yang ada. Mereka (kelompok-kelompok sosial tersebut) memiliki kebutuhan sosial yang harus terpenuhi jika ingin mengalami keadaan atau kondisi kesejahteraan sosial. Kebutuhan yang dimaksud mengacu pada kebutuhan kelangsungan hidup biologis seperti air minum yang aman, nutrisi, keamanan pribadi, dan tempat tinggal. Secara luas, disepakati bahwa masyarakat harus memiliki perawatan kesehatan dan tingkat pendidikan yang memadai, jaminan sosial, serta interaksi sosial yang harmonis sebagai syarat mengalami keadaan sejahtera secara sosial yang memuaskan.⁵⁰ Di satu sisi, menurut orang Malind **kesejahteraan berarti tanah dan hutan aman**.⁵¹ Mereka percaya bahwa tanah harus dijaga dan dilindungi dan jika mereka **gagal menjaga tanah**, maka mereka **akan mendapatkan nasib buruk**. Kepercayaan tersebut diwarisi turun-temurun oleh tiap generasi melalui dongeng-dongeng mengenai nenek moyang mereka, yaitu Dema.⁵²

Menurut PBB, masyarakat adat adalah mereka yang mewarisi serta mempraktikkan budaya dan cara berhubungan dengan manusia dan lingkungan. Kelompok masyarakat adat ini mempertahankan karakteristik budaya, politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda dari

⁴⁹ Abbie Bakan, "Exploitation, Alienation, and Oppression", accessed on 5/2/2023, <https://againstthecurrent.org/atc195/marx-bakan/>.

⁵⁰ Midgley, James. *Social Welfare in Global Context*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 1997. <https://doi.org/10.4135/9781483327945>.

⁵¹ Rassela Malinda, interview.

⁵² Pusaka, Sawit Watch, FPP, *Manis dan Pahitnya Tebu*, report, Pusaka, (Jakarta: Pusaka, Sawit Watch, FPP, 2013), <https://www.forestpeoples.org/id/topics/other-private-sector/publication/2013/manis-dan-pahitnya-tebu-suara-masyarakat-adat-malind-da>.

kelompok masyarakat dominan di tempat tinggal mereka.⁵³ Selaras dengan PBB, World Bank menulis bahwa masyarakat adat adalah kelompok sosial dan budaya yang secara kolektif berbagi ikatan leluhur mereka dengan sumber daya alam dan tanah di tempat yang mereka tinggali. Sumber daya alam bersama-sama dengan tanah sangat berkaitan erat dengan budaya, identitas, mata pencaharian, dan juga kesejahteraan baik secara fisik maupun spiritual mereka.⁵⁴

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Pamela Maykut dan Richard Morehouse, penelitian kualitatif secara umum meneliti kata-kata dan tindakan secara deskriptif atau dalam bentuk sebuah narasi dengan tujuan penelitian yaitu memahami dan menafsirkan sebuah perilaku atau interaksi sosial.²³ Dalam penelitian kualitatif, data-data yang dikumpulkan kerap muncul dalam bentuk kata-kata dan gambar.²⁴ Dengan demikian, wujud dari penelitian ini akan bersifat deskriptif analisis yang akan menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti secara sistematis.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode berbasis dokumen seperti undang-undang, metode berbasis internet untuk mengakses jurnal ilmiah, buku,

⁵³ United Nations, "Indigenous People at the United Nations", accessed on 6/14/2023, <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html>.

⁵⁴ World Bank, "Indigenous Peoples", accessed on 6/14/2023, <https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples>.

artikel, dan laporan-laporan LSM terkait, serta berita, dan metode berbasis wawancara. Dalam metode berbasis wawancara, penulis mewawancarai para narasumber yang fokus pada studi kasus dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

- Bab 1 adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah (Deskripsi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta Sistematika Pembahasan.
- Bab 2 membahas industri kelapa sawit Korindo Group di Merauke. Dalam bab ini, penulis menganalisis Korindo Group sebagai kelas penindas yang diawali dengan melihat latar belakang dan sejarah masuknya perusahaan tersebut di Papua lalu menganalisis kelas dari Korindo dengan mengacu pada temuan-temuan praktik aktivitas bisnis industri kelapa sawitnya beserta dampak yang ditimbulkan.
- Bab 3 menganalisis masyarakat adat sebagai kelas tertindas dengan menganalisis kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat adat setelah masuknya Korindo Group di Merauke.
- Bab 4 adalah kesimpulan dari penulis.